

**DARI PEMBERDAYAAN MENUJU EMANSIPASI;  
Telaah Kritis Terhadap *Social Entrepreneurship* dan Tawaran untuk  
Pembebasan Kaum Marginal**

***FROM EMPOWERMENT TO EMANCIPATION;  
a Critical Study on Social Entrepreneurship and an Offer  
for The Liberation of The Marginalized Society***

**Badrul Arifin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada  
E-mail: Badrularifin5@gmail.com

**Abstrak**

Kajian ini berusaha memberikan telaah kritis serta gagasan tambahan terhadap konsep *social entrepreneurship* dalam konteks ekonomi-politik yang lebih luas di Indonesia. Kajian ini beragumen bahwa narasi *social entrepreneurship* yang ada saat ini cenderung problematis dan anti politik, maka dari itu perlu dikritisi. Pertama, karena konsep *social entrepreneurship* dibaca sebatas dorongan untuk menciptakan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, *social entrepreneurship* bisa dikatakan mempunyai corak liberalisme sosial dan cenderung melanggengkan sistem ekonomi neoliberalisme. Ketiga, *social entrepreneurship* cenderung melihat kondisi marginal terbatas pada aspek teknis, dan mengabaikan aspek politis yang menyebabkan marginalisasi terjadi. Untuk itu, penulis menawarkan solusi berupa penambahan gagasan metapolitik sebagai ‘cangkang’ dari *social entrepreneurship*, agar supaya *social entrepreneurship* tidak hanya melakukan pemberdayaan yang sifatnya ekonomi semata namun mampu mengemansipasi kaum marginal. Untuk memperkuat argumentasi penulis terkait solusi yang ditawarkan, penulis mengambil contoh kasus seorang pemuda di Magelang yang berhasil mengemansipasi petani cabai melalui aksi-aksi metapolitik. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang *social entrepreneurship* itu sendiri.

**Kata kunci:** *social entrepreneurship, sociopreneur, emansipasi, marginalisasi*

**Abstract**

*This study is aimed to provide critical analysis and additional ideas on the concept of social entrepreneurship in a broader political-economic context in Indonesia. This study argues that the current social narrative of entrepreneurship tends to be problematic and anti-political so that it needs to be criticized. First, because the concept of social entrepreneurship is read only to encourage the creation of commodities that can be traded. Second, social entrepreneurship can be said to have a style of social liberalism and tend to perpetuate the economic system of neoliberalism. Third, social entrepreneurship tends to see marginal conditions limited to technical aspects, and to ignore the political aspects that cause marginalization to occur. To that end, the author offers solutions in the form of adding the idea of metapolitics as a ‘shell’ of social entrepreneurship so that social entrepreneurship not only does the empowerment that is merely economic but also has an ability to emancipate the marginal. To reinforce the author’s arguments regarding to the solutions offered, the author took the case of a young man in Magelang who successfully emancipated the chili farmers through metapolitics actions. With this study, it is expected to provide a new perspective on social entrepreneurship.*

**Keywords:** *social entrepreneurship, emancipation, politics, marginalization.*

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini, konsep *social entrepreneurship* mendadak populer dimana-mana. Menurut Fitriani (2016) gairah *social entrepreneurship* yang kini mulai tumbuh ditandai dengan banyaknya seminar, lokakarya tentang *social entrepreneurship* maupun hadirnya lembaga-

lembaga yang *concern* terhadap pengembangan *social entrepreneurship* seperti Ashoka Indonesia, Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI). Kampanye tentang *social entrepreneurship* juga digelar oleh korporasi sebut saja Bank BRI, Bank Danamon serta para korporasi *start up* besar. Begitupun dengan *Non*

*Government Organization (NGO)*, baru-baru ini tepatnya tanggal 26-29 September 2017, sejumlah *NGO* di Asia yang berfokus dalam isu-isu *social entrepreneurship* berkumpul di Kuta Bali dalam sebuah acara *2nd Social Enterprise Advocacy and Leveraging (SEAL) Conference*. Adapun tujuan dari acara yang berafiliasi dengan program *Social Development Goals (SDGs)* ini menurut Presiden *Institute for Social Entrepreneurship in Asia (ISEA)*, Marie Lisa Dicany (Republika, 2017) adalah merumuskan *grand design* tentang memecahkan masalah-masalah sosial melalui praktik *social entrepreneurship*. Pemerintah pun tak ketinggalan, melalui Kemenpora (2016) Pemerintah bekerja sama dengan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM telah dua kali mengadakan acara *Sociopreneur Muda Indonesia (Soprema)*. Adanya ajang tersebut, Pemerintah menyatakan bahwa akan terus aktif mendorong pemuda untuk bergerak di *social entrepreneurship*, diharapkan generasi muda mempunyai karakter *sociopreneurship*, berjiwa petarung, dan memiliki kegigihan serta kepekaan pada lingkungan sekitarnya (Jawa Pos, 2017). Hal itu demi menciptakan solusi atas masalah-masalah sosial ekonomi kreativitas anak-anak muda. Sederhanya, Kemenpora percaya bahwa pemuda Indonesia akan memperoleh jalur yang tepat melalui *social entrepreneurship*.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak yang meyakini bahwa *social entrepreneurship* merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial di Indonesia. Pernyataan tersebut bukannya tanpa alasan, sebab telah banyak studi yang menyebutkan bahwa salah satu solusi pengentas kemiskinan dan pengangguran efektif dunia adalah dunia wirausaha yang memperhatikan lingkungan sosialnya. Melalui aksi kewirausahaan sosial mampu mereduksi jumlah kemiskinan dan

membuka lapangan kerja. Ini telah dibuktikan dari studi yang dilakukan oleh Firdaus (2014) misalnya berbagai praktik kewirausahaan sosial yang dianggap sukses seperti pembiayaan mikro Grameen Bank oleh Muhammad Yunus, jasa keuangan Aavishkaar di Singapura, pembangunan jaringan listrik di Brazil oleh Fabio Rosa, pembangunan ekonomi masyarakat desa di Afrika Selatan oleh Paul Cohen, unit dana pertanian (*Farm Shop*) di Kenya oleh Madison Ayer, dan wirausaha sosial lainnya. Lebih lanjut, Utomo (2004) dalam tulisannya menyatakan di Indonesia, wirausaha sosial tumbuh dengan cepat seiring dengan keyakinan bahwa kewirausahaan sosial dapat mengatasi masalah-masalah sosial utamanya kemiskinan. *Social entrepreneurship* dirasa tepat dalam solusi gerakan sosial di bidang ekonomi yang dapat memberikan peluang usaha terutama di daerah pedesaan. Selain perbaikan ekonomi mikro, *social entrepreneurship* mampu meningkatkan perekonomian nasional (Bornstein, 2006).

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan *social entrepreneurship*, sehingga konsep tersebut digadang-gadang dapat membantu memperbaiki taraf kehidupan atau bahkan membebaskan kaum marginal? Menurut Karen Braun (Wibowo dan Nulhaqim, 2012) mendefinisikan *social entrepreneurship* sebagai:

*“The concept of social entrepreneurship is, in practice, recognized as encompassing a wide range of activities: enterprising individuals devoted to making a difference; social purpose business ventures dedicated to adding for profit motivations to the nonprofit sector; new types of philanthropist supporting ventures capital-like ‘investment’ portfolios; and nonprofit organizations that are reinventing themselves by drawing on lessons learned from the business world”*

Vasakaria (2009) juga mendefinisikan tipe dari pelaku *social entrepreneurship* sebagai

berikut, yakni: 1) Inovator dari kalangan sipil (*Civil innovator*); 2) Pendiri social enterprise yang mampu meningkatkan penerimaan (*Founder of a revenue generating social enterprise*); 3) Para aktor yang melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan yang menciptakan surplus untuk mendukung visi sosial (*Launcher of a related revenue generating activity to create a surplus to support social vision*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa *social entrepreneurship* melingkupi jumlah dan jenis aktivitas yang sangat luas; dengan ciri-ciri utama yaitu adanya gerakan individu yang ingin membuat perbedaan; aktivitas bisnis yang bermotivasi profit namun kemudian juga memiliki gairah pada sektor non profit; bentuk filantropi baru yang mendukung investasi portofolio modal ventura; dan organisasi non profit yang mereformasi dirinya dengan menarik pelajaran dari dunia bisnis. Dapat dikatakan bahwa terminologi *social entrepreneurship* sangat lekat dengan istilah-istilah manfaat sosial, bisnis, filantropi dan lain-lain. Artinya bahwa memang gerakan ini adalah gerakan yang menggabungkan antara keterampilan bisnis (*business skills*) dengan semangat filantropi sosial.

Berangkat dari latar belakang tersebut, pembacaan terhadap narasi *social entrepreneurship* yang ada selama ini lebih banyak didominasi oleh narasi yang dengan erat meletakkan *social entrepreneurship* sebagai suatu konsep pemberdayaan kaum marginal melalui dorongan untuk aktor agar menciptakan komoditas barang atau jasa yang sifatnya ekonomis. Narasi seperti ini bukan berarti tidak benar, namun pembacaan-pembacaan ini, bagi penulis seolah menjadikan *social entrepreneurship* sebagai konsep yang anti politik. Konsep '*social entrepreneurship*' bagi penulis tidak berbeda jauh dengan konsep

*empowerment* yang telah ada. Ia tetaplah konsep yang apolitis dan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan struktural dari marginalisasi kemiskinan.

## PEMBAHASAN

### ***Social Entrepreneurship: Pemberdayaan yang Anti-Politik***

Argumen-argumen di uraian sebelumnya telah mendeskripsikan bagaimana *social entrepreneurship* sebagai salah satu konsep *empowerment* kemudian dirasa mampu menjadi solusi. Narasi-narasi *empowerment* dalam *social entrepreneurship* kemudian dapat dipercaya untuk memberikan solusi efektif dan taktis terhadap permasalahan perekonomian Indonesia khususnya marginalisasi akibat kemiskinan karena bersifat *sustainable* pada perekonomian rakyat. Lalu apakah benar *social entrepreneurship* dirasa bisa membebaskan masyarakat dari marginalisasinya? Drayton (2002), menyebutkan bahwa dalam *social entrepreneurship* terdapat beberapa unsur diantaranya yaitu kemunculan ide-ide baru dalam memecahkan masalah, kreatif, memiliki sifat kewirausahaan dan mempertimbangkan dampak sosial yang muncul. Nilai-nilai sosial, masyarakat sipil, inovasi dan aktivitas ekonomi merupakan empat elemen utama dalam kewirausahaan sosial.

*Social entrepreneurship* juga menyediakan solusi untuk permasalahan yang gagal diselesaikan oleh institusi-institusi sosial, misalnya kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat termarginalisasi (Matin, 2007). Aktivitas utama kewirausahaan sosial dapat berupa penyedia berbagai barang dan jasa, pengembangan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi sosial bagi kelompok masyarakat yang termarginalisasi karena gagal dilayani oleh pelaku ekonomi dan pemerintah (Grunhagen and

Berg, 2012). Sepintas, jika dilihat dari konsep dan orientasinya, *social entrepreneurship* dengan beberapa aspek sosial dan ekonomi yang sedemikian rupa mempunyai spirit yang *altruistis*. Akan tetapi argumen-argumen tersebut dirasa problematis.

*Pertama*, sejatinya *social entrepreneurship* mempunyai misi yang mulia. Konsep yang diajukan oleh Praszkiec dan Nowark (2012) misalnya, mereka memberi lima dimensi dalam konsep *social entrepreneurship* yaitu misi sosial, inovasi sosial, perubahan sosial, semangat kewirausahaan dan kepribadian. Dari ke lima dimensi *social entrepreneurship* yang diajukan, dimensi perubahan sosial mencuri perhatian penulis. Bagi penulis, dimensi perubahan sosial yang diusung oleh *social entrepreneurship* merupakan suatu dimensi yang menjanjikan untuk mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih adil. Hanya saja, aspek perubahan sosial ini jarang disinggung dan cenderung disingkirkan dalam narasi *social entrepreneurship* yang diwacanakan baik oleh kampus, *Non Governmental Organization (NGO)*, Pemerintah ataupun Korporasi. Narasi perubahan sosial dalam *social entrepreneurship* sendiri masih kalah jauh dibanding narasi tentang bagaimana para *sociopreneur* didorong untuk menciptakan komoditas barang atau jasa yang dapat diterima oleh pasar sehingga bisa menambah *added value*.

*Kedua*, konsep *social entrepreneurship* dapat dikatakan sebagai corak neoliberalisme gaya baru. Menurut Fayyadl (2016) neoliberalisme dewasa ini hadir dengan wajah baru dan menjadi parasit bagi kehidupan sosial. Neoliberalisme jenis baru ini menjadikan hubungan sosial sebagai sumber modal yang terus-menerus dikeruk untuk memperpanjang perputaran kapital. Inilah yang disebut liberalisme sosial (*social liberalism*). Argumen ini kemudian diperkuat oleh Muhammad Yunus

seorang peraih nobel perdamaian lantaran aksi pemberdayaan ekonominya sukses membantu masyarakat miskin di Bangladesh, dalam bukunya yang berjudul “Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin” Yunus (2011) mengakui bahwa sistem Kapitalisme yang ada tidaklah seburuk apa yang dilihat oleh pengkritiknya, baginya Kapitalisme bisa berwajah baik taktala diberi nilai sosial dalam setiap orientasinya. Li (2014) menambahkan bahwa ciri liberalisme sosial kekinian adalah menempatkan masyarakat di pusat sebuah program yang massif dan mahal yang dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki berbagai ketidakcakapan program dan tata pemerintahan melalui cara-cara liberal (perencanaan, efisiensi dan kompetisi) sembari mengabaikan pelbagai relasi produksi dan alokasi yang tidak setara. Dengan menempatkan ‘yang sosial’ sebagai pusat, liberalisme sosial berusaha untuk pembentukan dan pelestarian masyarakat pasar liberal.

Skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Korporasi dan proyek penyertaan modal untuk masyarakat menurut Carrol (2015) adalah contoh perkembangan terkini dari “liberalisme sosial” tersebut: Anda boleh mengeksploitasi buruh sesukanya, atau mencemari alam sektornya, tetapi Anda dapat menebusnya dengan memberikan *CSR* yang menunjukkan betapa “sosial”-nya perusahaan Anda. Anda boleh berbisnis sambil lalu membantu masyarakat miskin sekitar Anda, asal jangan sampai Anda mengkritisi sistem ekopol kita hari ini. Karenanya yang perlu disadari kemudian adalah meskipun spirit yang dibawa oleh konsep *CSR* ataupun *social entrepreneurship* memang dapat membantu masyarakat marginal dari segi kemampuan atau *skill* ekonomi. Tetapi, situasi ini tidak akan benar-benar membawa kebaruan, tanpa benar-benar kita membongkar jalinan epistemik

dan melakukan kritik atas ideologi ekonomi politiknya yakni neoliberalisme.

*Ketiga*, yang membuat situasi ini semakin problematis adalah para penggagas *socio entrepreneurship* cenderung melihat marginalisasi hanya sebatas perkara ketidakmampuan ekonomi semata. Yang perlu digarisbawahi adalah marginal menurut Silver (2007) bukan sebatas ketidakberdayaan dalam *skill* ekonomi, lebih dari itu, ia lahir dari situasi yang multidimensional; marginal sama halnya dengan posisi yang mengalami eksklusi dalam relasi pekerjaan, keluarga, atau dalam lingkungan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan, atau partisipasi politik. Munk (2002) menyatakan bahwa kondisi marginal hari ini lebih disebabkan oleh marginalisasi struktural yang hadir dan muncul bukan karena takdir bukan karena kemalasan, atau bukan karena kurangnya *skill* si miskin. Namun marginalisasi struktural merupakan kondisi marginal yang muncul dari suatu usaha marginalisasi yang dilakukan oleh sebuah sistem ekonomi-politik negara.

Di titik inilah kemudian, pembacaan yang meletakkan kaum marginal sebatas ketidakmampuan ekonomi semata dan hanya bisa diselesaikan dengan aspek bisnis dalam spirit *socio entrepreneurship* berpotensi menjadikan para *sociopreneur* sebagai “Mesin Anti Politik”. Ferguson (1990) mendefinisikan mesin anti politik sebagai usaha dari agen untuk mendepolitisasi segala yang ia sentuh, di mana-mana menghapus realitas dan analisa politik dari pandangan masyarakat, walaupun masalah tersebut sebenarnya adalah persoalan politik sekalipun, sambil lalu menjalankan program-program teknis yang telah dirancang. Analisa politik yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana dimensi relasi kekuasaan yang mengondisikan marginalisasi itu terjadi. Cara kerja mereka lebih menekankan pada

peningkatan kapabilitas masyarakat yang marginal dari pada praktik-praktik marginalisasi satu kelompok oleh kelompok lainnya, dengan “solusi teknis untuk masalah teknis”, bukan solusi politik tentang alokasi sumber daya yang setara. Akibatnya kemudian yang perlu diwaspadai adalah *social entrepreneurship* sebagai konsep *empowerment* yang anti politik justru melanggengkan kondisi struktural yang selama ini menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi, alih-alih membebaskan kaum marginal dari permasalahan marginalisasi yang dihadapi.

### **Menjadikan Aksi Emansipasi**

*Social entrepreneurship* boleh jadi mempunyai potensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kemampuan kewirausahaannya. Sayangnya, kemampuan kewirausahaan saja tidak cukup sebagai bekal untuk mendorong terjadinya transformasi sosial. *Social entrepreneurship* dengan narasi yang ada secara aksiologis berpotensi untuk menjadikan para agen-agensya sebagai mesin anti politik dan melakukan depolitisasi terhadap kaum marginal. Maka dari itu agar *sociopreneur* tidak menjadi agen-agen yang melanggengkan kondisi struktural yang menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi, diperlukan pemahaman ‘politis’ dari untuk diletakkan sebagai ‘cangkang’ *social entrepreneurship* itu sendiri. Pemahaman politis atau ‘metapolitik’ di sini menurut Badiou (2005) adalah suatu metode untuk menganalisa permasalahan sosial dengan melihat aspek struktur politik atau relasi kekuasaan yang bekerja. Tujuan dari metapolitik tak lain adalah untuk membuat *social entrepreneurship* sebagai konsep yang mempunyai agenda emansipatif. Emansipasi merupakan konsep yang hadir bukan sekedar memberdayakan masyarakat, lebih dari itu menurut Engineer (2005) emansipasi berarti usaha yang membebaskan masyarakat dari struktur sosial

yang tidak ramah, menindas, diskriminatif, dan eksploitatif serta mengubahnya kepada struktur manusiawi (humanis, berintegritas, egalitarian) dan berkeadilan.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana bentuk konkret dari metapolitik apabila dikontekskan dengan *social entrepreneurship*? Mula-mula, para *sociopreneur* perlu didorong diberikan pemahaman politis tentang apa yang membuat kondisi marginalisasi itu terjadi secara struktural. Lalu, berikan *sociopreneur* kemampuan berupa *skill* advokasi sosial, agar mereka memahami bagaimana upaya atau tindakan yang diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari kondisi marginal. Kemampuan advokasi sosial di sini meliputi kemampuan menganalisis isu sosial politik, kemampuan mengorganisir massa, serta kemampuan bernegosiasi dengan pihak-pihak yang mengondisikan terjadinya marginalisasi. *Sociopreneur* perlu memberikan pencerdasan terhadap masyarakat marginal tentang hak-hak politik yang selama ini dirampas. Tentang apa yang membuat kaum marginal tertindas. Di sinilah kemudian pentingnya kemampuan mengorganisir massa. Ringkasnya, kerja atau aksi *sociopreneur* terhadap kaum marginal kini bertambah, selain tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan memberikan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum marginal, sambil lalu juga melakukan advokasi sosial terhadap masyarakat marginal tersebut.

Aksi-aksi tersebut dapat dikatakan sebagai kerja emansipatif. Aksi tersebut tidak semata hanya bergelut di pemberdayaan, lebih dari itu ada agenda pembebasan kaum marginal yang ingin dicapai. Dengan kata lain, aksi emansipasi berkaitan dengan, keterlibatan secara langsung dengan kehidupan masyarakat marginal melalui observasi, partisipasi, aksi, dan penyadaran. Akan tetapi aksi tersebut memerlukan agen-agen yang disebut Gramsci sebagai 'Intelektual

Organik'. Menurut Gramsci (Fiori; 2006), intelektual organik, yakni para agen yang mampu membuat konvergensi antara teori dan realita sosial untuk kemudian dijadikan sebagai analisa utama dalam relasinya dengan struktur dan perubahan sosial. Secara praksis, intelektual organik adalah suatu subyek politik yang mampu merasakan emosi, semangat dan apa yang dirasakan kaum kelas bawah, menjadi pelopor, memihak kepada mereka dan bergerak bersama untuk mewujudkan transformasi sosial yang lebih adil tanpa adanya penindasan.

### **Pelajaran dari Tunov**

Lantas seperti apa *social entrepreneurship* yang berbasis emansipatif? Sejatinya, aksi *social entrepreneurship* dengan spirit emansipatif sudah pernah dilakukan di Indonesia. Yang terbaru misalnya, Harian Kompas (2016) meliput sosok pemuda bernama Tunov Mondro Atmodjo di sebuah Desa Girikulon tepatnya di Kabupaten Magelang. Ia sukses membuat petani cabai di sana keluar dari struktur yang memarginalisasinya selama ini. Cerita itu dimulai taktala Tunov yang awalnya memberi penyuluhan dan bibit pertanian cabai kepada petani mendapati suatu realitas yang sering membuat petani merugi dan terjerat meskipun kenyataannya harga cabai di pasaran sering mengalami kenaikan. Alih-alih fokus dalam memberi penyuluhan dan bibit untuk meningkatkan produktivitas pertanian cabai, rupanya Tunov mengajak petani untuk melakukan analisa sosial secara sederhana tentang kondisi apa yang membuat petani merugi.

Ternyata akar masalahnya bukan terdapat pada rendahnya produktivitas petani cabai, melainkan kongkalikong antara pemerintah dan tengkulak. Mereka bisa menekan harga di tingkat petani serendah mungkin, kemudian menjual harga cabai di pasar setinggi mungkin.

Akibatnya, harga cabai yang tinggi itu hanya dinikmati tengkulak. Untuk mengatasi hal tersebut, mula-mula Tunov bersama petani membentuk Paguyuban Kelompok Tani (Gapoktan) dan koperasi pertanian (Bisnis.com, 2017). Adanya usaha kolektif tersebut Tunov dan petani membuat jalur pemasaran tunggal sejak 2015. Ia pun melarang petani menjual cabai sendiri-sendiri.

Cabai yang dipanen dikumpulkan di rumah kelompok tani. Ia lalu memanggil pedagang untuk membeli cabai secara lelang. Penjualan cabai bisa dilakukan tanpa lewat tengkulak atau mafia cabai. Harga cabai di tingkat petani pun meningkat. Selain itu, sebagian cabai dikirim langsung ke pasar induk di Jakarta. Gerakan Tunov dan para petani itu sempat mendapat perlawanan dari mafia cabai yang merugikan akibat aksi dari Tunov. Sejumlah tengkulak menebar teror dan ancaman kepada petani dan pedagang yang menerima pasokan cabai dari Magelang. Namun, Tunov dan kawan-kawan tetap bergeming. Tunov secara aktif terus memberi penyadaran politis dan mengorganisir para petani cabai untuk konsisten bergerak. Berkat aksi dan usahanya, Tunov berhasil mendesak pemerintah untuk menetapkan harga jual terendah cabai yakni Rp.15.000. Yang terpenting adalah, Tunov sukses membuat petani cabai kembali sejahtera dan keluar dari struktur yang selama ini memarginalisasikannya.

## PENUTUP

Kajian ini berusaha mengatakan bahwa narasi *social entrepreneurship* yang ada sekarang tidak serta membebaskan seseorang dari kondisi marjinalnya. Pasalnya, narasi tentang *social entrepreneurship* lebih didominasi pengentasan kaum marginal sebatas melalui penciptaan komoditas barang atau jasa yang sifatnya ekonomis. Narasi yang ada selama ini percaya bahwa dengan solusi teknis yang bersifat

ekonomi kaum marginal akan terbebas dari marginalisasinya. Dengan kata lain, tidak ada narasi lain yang mencoba memberi perspektif alternatif dalam mengentaskan kemiskinan atau marjinalisasi selain dengan pendekatan berbasis ekonomi belaka. Argumen semacam inilah yang kemudian menjadikan *social entrepreneurship* sebagai konsep *empowerment* yang anti politik. Narasi tersebut gagal melihat secara politis, relasi struktur dan kekuasaan apa yang membuat kondisi marginal itu terjadi.

Oleh karena itu, agar *social entrepreneurship* tidak menjadi sebuah *empowerment* yang anti politik, diperlukan suatu metapolitik sebagai gagasan yang perlu ditambahkan kepada *social entrepreneurship*. Hal tersebut menjadi penting mengingat salah satu misi *social entrepreneurship* adalah mengentaskan kaum marginal. Cara mengentaskan kaum marginal pun bukan sebatas pemberdayaan ekonomi semata, akan tetapi melalui kerja-kerja yang mendorong terciptanya emansipasi atau pembebasan bagi kaum marginal. Untuk memberi gambaran kongkret bagaimana metapolitik disandingkan dengan *social entrepreneurship*. Kajian ini mengangkat kisah Tunov yang menjadi *sociopreneur* progresif dalam mengorganisir petani melawan mafia cabai. Perlu digarisbawahi adalah, sudah saatnya penggagas *social entrepreneurship* mendorong para pemuda dan *sociopreneur* untuk mempunyai karakter metapolitik lainnya yang dimiliki Tunov. Cerita Tunov yang melakukan aksi emansipasi terhadap petani cabai pun layak diapresiasi dan dijadikan *role model* bagi calon *sociopreneur*, khususnya pemuda. Seperti yang diketahui sudah banyak institusi yang menggelar *event* atau acara bertema *social entrepreneurship* yang menyasar pemuda sebagai agen *social entrepreneurship*.

Pada akhirnya kajian ini berpendapat bahwa selain membawa misi *empowerment*,

*sociopreneur* juga wajib mengemban misi emansipasi kaum marginal. Artinya kerja atau aksi *sociopreneur* terhadap kaum marginal kini bertambah, selain melakukan *empowerment* dengan memberikan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum marginal, sambil lalu juga menjadikan emansipasi kaum marginal sebagai agenda utama melalui kerja atau aksi advokasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badiou, Alan. (2005). *Metapolitics; Radical Thinkers*. London: Verso Book.
- Bornstein, David. (2006). *Mengubah Dunia: Kewirausahaan Sosial dan Kekuatan Gagasan Baru*. Yogyakarta: INSIST Press-Nurani Dunia.
- Carrol, Toby. (2010, Juli 3). "Pembangunan Sosial sebagai "Kuda Troya" Neoliberal". *Prisma* edisi Vol. 29, No. 3, hal 84.
- Drayton, Bill. (2002). "Defining the Social in Social Entrepreneurship". *International Entrepreneurship and Management Journal*. Vol 1. Pp 53-365.
- Engineer, Ali Asghar. (2005). *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS.
- Fayyadl, Mohammad. Al. (2016). Membangun Keberislaman yang materialis; Arah Perjuangan Ekonomi-Politik Islam Progressif. Diakses dari <http://islambergerak.com/2016/10/membangun-keberislaman-yang-materialis-arah-perjuangan-ekonomi-politik-islam-progresif/>
- Ferguson, James. (1990). *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Fitriani. (2016). *Adopsi Inovasi Rainbow Weaving Craft dan Implementasi Pemberdayaan Berbasis Social Entrepreneurship di Dusun Sejati Desa, Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman*. (Skripsi S1 Fisipol UGM)
- Fiori, Guiseppe. (2006). *Antonio Gramsci: Life of a Revolutionary*. London: Verso Book.
- Firdaus, Nur. (2014). "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 22, No. 1.
- Grunhagen dan Berg H. (2012). *Social Entreprenurship in the market System In Volkmann, C.K., tokarski, K.O, dan Ernst, K. (eds). Social Entreprenurship and social business: An Introduction and Dscssion*.
- Herusansono, Wiranto. (2016). "Tunov; Menggunting Mafia Bisnis Cabai". *Kompas*, 15 November, hal. 8.
- Kemenpora. (2016, September 9). *Kemenpora Konsisten Menciptakan Wirausaha Muda Indonesia yang Mandiri (online)*. Diakses dari <http://www.kemenpora.go.id/index/preview/berita/10888>
- Li, Tania Murray. (2012). *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta. Marjin Kiri.
- Matin, Roger L. dan Sally Osberg. (2007). *Social Entrepreneurship: The Case for Definition*. NY: Leland Stanford Jr. University .

- Munk, Martin D. (2002). *Gender, Marginalisation, and Sosial Exclusion*. The Danish National Institute of Social Research.
- Putri, Winda D. (2017, September 28). Kewirausahaan Sosial, Modal Entaskan Kemiskinan di Asia. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/27/owx8sd-kewirausahaan-sosial-modal-entaskan-kemiskinan-di-asia>
- Praszkier, Ryszard dan Andrzej Nowak. (2012). *Social Entrepreneurship: Theory and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Prasetyo, Suryo E. (2017, Oktober 13). Dukung Fisipol UGM Pusat Pengembangan Pemuda Sociopreneur SOPREMA 2017. Diakses dari <https://www.jawapos.com/read/2017/10/12/162320/dukung-fisipol-ugm-pusat-pengembangan-pemuda-sociopreneur-soprema-2017>
- Silver, H. (2007). *The Process of Social Exclusion: The Dynamics of an Evolving Concept*. CPRC Working Paper.
- Ulum, Mifathul. (2017, Februari 02). Ditekan Tengkulak Petani Cabai di Magelang Bentuk Koperasi. Diakses dari <http://semarang.bisnis.com/read/20170209/14/92075/dijerat-tengkulak-petani-cabai-di-magelang-bentuk-koperasi>.
- Utomo, H. (2014). “Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial”. *Jurnal Among Makarti*. Vol. 7, No. 14.
- Vasakaria, Vasudha. (2008). “A Study on Social Entrepreneurship and the Characteristics of Social Entrepreneur”. *The Icfaian Journal of Management Research*, Vol. VII, No. 4, 2008.
- Wibowo, Hery dan Sony Nulhaqim. (2015). *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. Bandung: Unpad Press
- Yunus, Muhammad. (2011). *Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin*. Jakarta. Gramedia Pustaka.